



Buletin Parlementaria

Nomor 1004/IV/IV/2018 • April 2018

DPR Desak Facebook Perbaharui Ketentuan Sanksi Pihak Ketiga



9 772614 339005

FESTIVAL & DISKUSI

Kopi, Teh dan Cokelat

PRODUK PETANI INDONESIA



GEDUNG DPR RI
25 - 27 APRIL 2018

TIDAK
DIPERJUAL
BELIKAN



Foto: Arief/ik

Pimpinan Komisi I DPR RI saat RDPU dengan Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia dan Vice President of Public Policy Facebook Asia Pasific

DPR Desak Facebook Perbarui Ketentuan Sanksi Pihak Ketiga

Komisi I DPR RI mendesak Facebook segera memperbarui ketentuan sanksi terhadap pihak ketiga yang melakukan pelanggaran perjanjian, termasuk penyalahgunaan data pengguna jejaring sosial tersebut. Keamanan dan kerahasiaan data pengguna merupakan tanggung jawab Facebook, sehingga pengguna merasa terlindungi.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais menilai, *platform policy* Facebook terkait pelanggaran pihak ketiga belum diatur secara tegas. Padahal, terjadinya kebocoran data pengguna Facebook yang menyebabkan kerugian secara internasional bukanlah sebuah pelanggaran yang ringan.

Hal itu diungkapkannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dipimpin Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almayshari dengan Kepala Kebijakan Publik

Facebook Indonesia Ruben Hattari dan *Vice President of Public Policy Facebook Asia Pasific* Simon Milner, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/4).

“Kita sadari bersama *platform policy* Facebook belum diatur secara tegas, tanpa ada perubahan yang serius terkait *platform policy*-nya, tentu ini melanggar kesepakatan kita dan kalau itu sudah masuk ke ranah hukum, sebaiknya aturan ditegakkan,” ungkap Hanafi.

Sejatinya, sambung Hanafi, Facebook sebagai penyedia layanan memberikan proteksi terhadap

penggunanya. Namun, hal ini tidak dirasakan, sebab Facebook sendiri tidak mencantumkan sanksi bagi pihak ketiga yang menyalahgunakan data pengguna. Seperti yang dilakukan Aleksandr Kogan kepada Cambridge Analytica, yang diduga telah terjadi kebocoran 1,096 juta data pengguna Facebook di Indonesia, atau 1,26 persen dari total jumlah orang yang terdampak kebocoran data secara global.

“Kita ingin jaminan, khususnya Facebook Indonesia untuk menjalankan *term of service* terkait dengan privasi dan keamanan data pengguna. Facebook sudah menyatakan

setiap pengguna melakukan register, tentunya harus dipenuhi dan tidak cukup hanya dengan meminta maaf,” kritisnya.

Dirinya mengingatkan, model kerja sama Facebook dengan pihak ketiga harus mengedepankan perlindungan keamanan dan kerahasiaan data bagi pengguna di Indonesia, serta memberikan sanksi tegas bagi pihak ketiga yang melakukan pelanggaran perjanjian termasuk penyalahgunaan data pengguna.

“Kami juga meminta hasil audit investigasi anda terkait penyalahgunaan 1 juta data orang Indonesia terkait Cambridge Analytica. Kami meminta seutuhnya, itu juga berarti kami akan segera memanggil Facebook datang kembali untuk menindaklanjuti hasil rapat kita ini,” sambung Anggota F-PAN ini.

Hanafi menambahkan, momentum ini harus menjadi perhatian pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Hukum dan HAM untuk segera mengajukan RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR, agar segera dibahas Komisi I.

“Sebenarnya kejadian Facebook ini momentum yang bagus untuk pemerintah segera memprioritaskan RUU Perlindungan Data Pribadi, itu sudah sejak dulu kita ingatkan kepada Kominfo untuk kerja sama dengan Kemenkumham dan Baleg untuk bisa memprioritaskan ini, kalau misalnya di Prolegnas bisa dibahas Komisi I,”

Model kerja sama Facebook dengan pihak ketiga harus mengedepankan perlindungan keamanan dan kerahasiaan data bagi pengguna di Indonesia, serta memberikan sanksi tegas bagi pihak ketiga yang melakukan pelanggaran perjanjian termasuk penyalahgunaan data pengguna



andasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta Facebook menunjukkan nota kesepahaman dengan pihak ketiga. Namun, Facebook tidak bisa menunjukkan karena tidak memiliki dokumen dengan tanda tangan fisik kedua belah pihak.

Hal ini menjadi pertanyaan Meutya dan sejumlah anggota dewan lainnya. Menurutnya, merupakan suatu kejanggalan jika perusahaan sebesar Facebook sama sekali tidak mencatatkan klausul sanksi apabila pihak ketiga melakukan pelanggaran.

“Aplikasi di *take down* itu adalah sanksi yang sangat ringan, semua orang bisa mencoba menjadi pihak ketiga, ketika data sudah diambil dan tidak dikenakan sanksi secara hukum,” lirihnya.

Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia Ruben Hatari menjelaskan kronologis bocornya data pengguna Facebook ke Cambridge Analytica. Pada tahun 2013, sebuah aplikasi “thisisyourdigitallife” dikembangkan oleh seorang peneliti bernama Aleksandr Kogan.

Kogan pada saat itu adalah seorang akademisi di Cambridge University yang tengah mengembangkan aplikasi menggunakan fitur Facebook Login. Facebook Login memungkinkan pengembang aplikasi pihak ketiga untuk meminta persetujuan dari pengguna aplikasi Facebook agar aplikasi mereka bisa mengakses kategori data tertentu yang dibagikan pengguna dengan teman Facebook mereka.

Setelah mendapatkan data pengguna Facebook, data tersebut kemudian dijual secara ilegal ke Cambridge Analytica yang kemudian digunakan untuk mendesain iklan politik yang mampu mempengaruhi emosi pemilih. Data tersebut diduga digunakan untuk kampanye Donald Trump dalam pemilihan Presiden AS. Aplikasi “thisisyourdigitallife” sudah dihentikan sejak 17 Desember 2015, namun Facebook hingga kini belum memproses kasus tersebut secara hukum karena dalam *platform policy* nya tidak menentukan ketentuan berupa sanksi secara pidana maupun perdata kepada pihak ketiga yang melakukan penyalahgunaan data. ■ ann@f



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

WK. PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),

Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),

Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Suciati, S.Sos, Sofyan Efendi

SEKRETARIS REDAKSI

Hasri Mentari, Guntur Dewanto

ANGGOTA REDAKSI

Mastur Prantono, Agung Sulistiono, SH,

Erman Suhendri, S.Sos.I, Erlangga Panji Samudro, S.I.Kom

Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske

Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko,

Ria Nur Mega, Taufan Syahrullli

REDAKTUR FOTO

Eka Hindra, Iwan Armanias

FOTOGRAFER

Soepardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,

Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana,

Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni,

Azka Restu Fadilah

ADMINISTRASI

Luthfi Suci Nur 'Aini, Damar Maulana Taher, Geraldidi Opie

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA

Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI

Gedung Nusantara II Lt. 3

Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta

Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,

e-mail: bag_media@dpr.go.id, www.dpr.go.id/berita

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Drs. Sunardi, M.M (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

FOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah,

Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom,

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

ADMINISTRASI

Sjaefudin, S.Sos

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif Lamin, Yuliana Puspita

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

DPR Minta RRT Libatkan Pekerja Indonesia



Foto: Jayadi/jk

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menerima cenderamata dari Dubes Republik Rakyat Tiongkok

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk lebih banyak melibatkan pekerja Indonesia dalam proyek-proyek mereka di Indonesia. Ia mengingatkan, serbuan tenaga kerja asing ke Indonesia jangan sampai menguasai lapangan kerja dalam negeri.

“Kita sangat senang RRT banyak berinvestasi di Indonesia. Tetapi, jangan sampai investasi RRT di Indonesia justru merugikan tenaga kerja dalam negeri. Para pekerja lokal seolah tersingkir oleh pekerja asing,” ungkap Bamsuet, sapaan akrabnya, saat menerima Duta Besar RRT untuk Indonesia Xiao Qian di ruang kerjanya, Senayan, Jakarta, Rabu (18/4).

Bamsuet menuturkan, saat ini banyak pekerja asal RRT bekerja diberbagai bidang. Mulai dari buruh, pekerja infrastruktur hingga pekerjaan yang mengandalkan kekuatan fisik lain-lainnya. Padahal, masih banyak masyarakat Indonesia yang membutuhkan pekerjaan.

“Proyek-proyek RRT di Indonesia harus bisa banyak menyerap tenaga kerja

Indonesia. Boleh saja, mendatangkan pekerja dari RRT, tetapi dengan klasifikasi khusus yang kemampuannya tidak dimiliki pekerja Indonesia,” tegas Bamsuet.

Di sisi lain, Bamsuet berharap hubungan kerjasama antara Indonesia dan RRT terus meningkat di berbagai sektor. Kualitas hubungan yang seimbang dan saling menghormati antara kedua negara

Investasi RRT telah merambah ke berbagai sektor. Antara lain, pertambangan, transportasi, konstruksi, real estate, perkebunan, pembangkit listrik dan pembangunan smelter nikel

harus terus dikembangkan. Menurutnya, Indonesia dan RRT merupakan dua negara besar di dunia.

“Hubungan yang ada tidak sebatas membahas hubungan bilateral saja, tetapi juga isu kawasan dan dunia. Saya senang hubungan bilateral antara Indonesia dan RRT terus membaik dari tahun ke tahun,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu menuturkan, di bidang ekonomi hubungan Indonesia-RRT terus mengalami peningkatan. Nilai perdagangan antara Indonesia dan RRT pada tahun 2017 mencapai 63,358 miliar dolar AS. Jumlah tersebut meningkat 17 persen dibanding tahun 2016, yaitu 47,59 miliar dolar AS.

“Peningkatan nilai perdagangan ini membuktikan kedua negara memiliki hubungan yang berkelanjutan dalam kerjasama ekonomi. Perdagangan yang saling menguntungkan dan seimbang harus lebih kita tingkatkan lagi,” kata Bamsuet.

Di bidang investasi, RRT masuk dalam tiga besar negara yang memiliki investasi tinggi di Indonesia. Nilai investasi RRT di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 3,4 miliar dolar AS dalam 1.977 proyek. Investasi tersebut naik dari tahun sebelumnya, sebesar 2,66 miliar dolar AS.

“Investasi RRT telah merambah ke berbagai sektor. Antara lain, pertambangan, transportasi, konstruksi, real estate, perkebunan, pembangkit listrik dan pembangunan smelter nikel. Kita harapkan kedepan untuk peningkatan investasi bisa dilakukan dengan mensinergikan konsep pembangunan, seperti pembangunan poros maritim nasional,” sambung Bamsuet.

Bamsuet menambahkan, di bidang pariwisata jumlah turis dari RRT menempati peringkat pertama dengan jumlah lebih dari 2 juta orang pada tahun 2017. Jumlah tersebut naik dari tahun 2016, sebanyak 1.304.760 orang.

“Kita senang angka wisatawan RRT yang berkunjung ke Indonesia lebih dari 2 juta orang pada tahun lalu. Indonesia memiliki banyak tempat wisata yang indah dan eksotis. Kami harap pihak kedutaan besar RRT bisa terus mempromosikan Indonesia agar makin banyak wisatawan dari RRT yang berkunjung ke negara kami,” pungkas politisi dapil Jawa Tengah VII ini.

Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPR Utut Adianto, Wakil Ketua Komisi I DPR Satya Widya Yudha dan Asril Tanjung, serta Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Dari Kedubes RRT hadir Kepala Bagian Politik Wang Shikun, Atase bidang Politik Zhu Yarong, serta penasehat bidang politik Xu Hangtian. ■ ann/sf

Fadli Zon Sayangkan Minimnya Peneliti di DPR

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyayangkan jumlah peneliti di DPR masih sangat minim. Menurutnya keberadaan peneliti di lembaga legislatif sangat vital, sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada hajat hidup orang banyak. Ia berharap kuantitas dan kualitas peneliti di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI meningkat.

Hal ini diungkapkan Anggota F-Gerindra itu saat menghadiri seminar nasional dan pelantikan pengurus Himpunan Peneliti Indonesia (HIMPENINDO) cabang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang bertajuk Peran Peneliti dalam Peningkatan Kualitas Kinerja Parlemen.

“Sangat sedikit ya, hanya 77 orang. Tentu ini perlu kita tingkatkan lagi paling tidak dua kali lipat dari jumlah saat ini dan dibarengi dengan peningkatan kualitasnya,” harap Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta

(17/4).

Fadli menambahkan, sebagai lembaga yang memiliki fungsi dibidang pengawasan, legislasi dan anggaran, DPR membutuhkan sebuah riset yang didasarkan pada pertimbangan ilmu, nilai-nilai kemanusiaan dan kejujuran, agar setiap kebijakan yang diputuskan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut politisi dapil Jawa Barat ini, tuntutan peneliti di DPR berbeda dengan peneliti lainnya. Sebab sebagai *supporting system* parlemen yang terdiri dari beberapa komisi dengan

bidang yang berbeda, peneliti di DPR tidak cukup hanya fokus pada satu bidang melainkan perlu keahlian yang melintasi berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, hubungan internasional, dan hukum.

Untuk itu, Fadli berharap Setjen dan BK DPR RI dapat meningkatkan jumlah peneliti di DPR dalam waktu yang tidak terlalu lama, mengingat akan ada penambahan jumlah Anggota DPR RI. Selain itu, perlu peningkatan kualitas peneliti guna mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencapai organisasi profesi yang handal, berwibawa, dan ikut serta memajukan parlemen dan dunia penelitian Indonesia melalui pelatihan, seminar dan kegiatan yang terkait hal ini.

“Selama ini peneliti sangat membantu ya, apalagi turut serta dalam pendampingan kepada Anggota Dewan, di dalam berbagai kerjanya terkait fungsi dan tugas. Jadi dengan segala keuntungan yang telah kita rasakan, tolong Setjen cari cara agar segera menambah jumlah peneliti,” tutup Fadli. ■ [apr/sf](#)



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon didampingi pejabat Setjen dan Badan Keahlian DPR menyaksikan penandatanganan para pengurus HIMPENINDO, usai dilantik



Foto: Arief/ik

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menerima kunjungan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI)

Taufik Kurniawan: UU Desa Harus Segera Direvisi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Desa harus segera direvisi. Pasalnya, UU Desa yang berlaku saat ini, belum mengatur secara tegas mengenai status perangkat desa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Selain itu, perlu ada kejelasan dari status dan posisi Ketua RT atau Ketua RW, karena mereka merupakan bagian dari perangkat desa. Tentu perangkat desa tidak bisa bekerja maksimal kalau tidak didukung Ketua RT/RW. Ini perlu ada perlindungan status hukum, makanya yang akan datang perlu adanya revisi UU Desa,” kata Taufik.

Politisi Partai Amanat Nasional itu mengaku prihatin dengan kondisi Ketua RT dan Ketua RW. Pasalnya, honor yang diterima keduanya hanya Rp300 ribu setahun. Padahal, jika tanpa adanya mereka, perangkat desa tidak

bisa bekerja. Selain itu, selama ini tak ada *reward and punishment*, padahal pekerjaan mereka sangat dituntut.

“Dulu dalam UU Desa tidak pernah bermimpi akan dialokasikan anggaran sebesar Rp1 miliar per desa, karena ini merupakan hasil perjuangan dari perangkat desa. Namun, dalam pelaksanaan teknisnya, ini membutuhkan penyempurnaan, karena perangkat desa yang berjuang dari awal, hak dan kewajibannya menjadi tertinggal,” imbuh Taufik.

Taufik memastikan akan menginisiasi revisi UU Desa, dan akan menyampaikan Daftar Inventarisasi

Masalah (DIM) melalui fraksinya dan pemerintah. Menurutnya, UU Desa perlu penyempurnaan. Karena, dengan anggaran Dana Desa yang mencapai Rp70 triliun setiap tahunnya, namun masih ada ketimpangan. Pelaksanaan teknisnya pun masih diatur dalam Peraturan Menteri (Permen), di luar UU Desa.

“Misalnya, dalam Permen itu harus ada BUMDES dan APBDes. Ini kan memberatkan, bagaimana mungkin disertai dengan syarat-syarat yang begitu ketat, karena Kepala Desa ini bukan administratif seperti PNS yang lengkap aparatnya. Harus ada akuntan



Foto: Andri/zk

Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto menerima kunjungan Musisi Cilik Jefri Setiawan di ruang kerjanya

Utut Adianto Apresiasi Jefri Setiawan Pecahkan Rekor

Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto mengapresiasi positif capaian siswa kelas VI Sekolah Dasar Jefri Setiawan yang telah memecahkan banyak rekor bermain piano tanpa melihat. Ini kebanggaan bangsa yang harus diperhatikan pemerintah. Bakat-bakat anak bangsa perlu dijaga dan diberi fasilitas untuk mengembangkan dirinya.

publik, ini dari mana biayanya. Mereka dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal juga sangat bagus, tapi dipaksakan untuk memenuhi syarat-syarat yang tidak ada dalam UU, dan hanya diatur dalam Permen bahwa BUMDES dan APBDes syarat mutlak dari Dana Desa itu,” tandas Taufik.

Taufik menambahkan, sebelumnya, saat RDPU antara Komisi II DPR RI dengan PPDII terkait hak dan status perangkat desa, menyimpulkan kesepakatan dengan pemerintah mengenai status perangkat desa yang sebelumnya menginginkan agar menjadi PNS, namun ketika pembahasan kesimpulannya menjadi status perangkat desa itu setara dengan PNS golongan IIA.

“Kemudian hak mengenai tunjangan atau apapun, harus dimasukkan dalam APBN 2019. Nanti dalam proses pembahasan anggaran akan diteruskan ke Komisi XI dan Badan Anggaran DPR RI. Ini sebetulnya perjuangan yang lama dan harus kita apresiasi,” imbuh politisi dapil Jawa Tengah itu. ■ sf

Anak asal Kendal, Jawa Tengah ini, menjadi aset bangsa di masa depan. Pada usia belia, Jefri mampu memainkan piano dengan berbagai lagu tanpa melihat. Ini rekor langka yang belum dipecahkan. Saat diterima Utut di DPR, Jefri menyampaikan dirinya pernah bermain piano tiga jam nonstop di Singapura untuk 70 lagu. Aksi ini mencatatkan dirinya sebagai pemegang rekor dunia.

“Kita sekarang butuh banyak anak Indonesia yang ahli di segala bidang. Saya juga mendengar Jefri akan ke Berlin memecahkan rekor lagi bermain piano dengan mata tertutup untuk Universal Record Forum. Kami akan dukung sebaik-baiknya, karena ini kan kebanggaan bukan hanya keluarga, tapi jadi kebanggaan negara,” ucap Utut dalam pertemuan di DPR, Senayan, Jakarta, Senin, (16/4).

Lebih jelasnya, pada Juni nanti di Berlin, Jefri akan memecahkan rekor dunia untuk *playing medley of 120 songs with piano within 3 hours* dengan mata tertutup.

Negara, lanjut Utut, harus membantu anak bangsa yang berbakat seperti Jefri. Sebelumnya, Jefri sudah pula bertemu dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Pemuda dan Olahraga untuk mendapatkan dukungan. Kementerian Luar Negeri juga sudah memfasilitasi keberangkatan Jefri ke Berlin ini.

Dalam pertemuan itu, Jefri sempat pula memainkan pianonya tanpa melihat di hadapan Utut dan sejumlah wartawan. Siswa SD Amanda Kendal itu sangat piawai memainkan piano sekaligus bernyanyi dengan mata tertutup. Ini membuat para penonton terkesima, kata Utut. Jefri juga menceritakan kisahnya saat mengawali hobinya bermain piano. Belajar secara otodidak melalui internet.

Di sekolah, Jefri juga selalu juara kelas dan menggemari pelajaran Matematika dan Bahasa Inggris. *Genre* lagu yang disukainya adalah jazz, klasik, dan pop. Lagu-lagu barat populer dinyanyikannya dengan berpiano tanpa melihat seperti ditunjukkan di hadapan Utut. ■ mh/sf



Foto: Azka/jk

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menerima audiensi Pokja Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

Hayati dan Ekosistem di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/4).

Pimpinan DPR Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan itu menyampaikan bahwa dalam waktu dekat, revisi terhadap UU Nomor 5 Tahun 1990 tersebut sudah bisa dilaksanakan.

“Kedatangan Pokja Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem ini ke DPR adalah bertujuan untuk memberikan masukan kepada kita, supaya ada *back mind* dalam pembahasan UU. Sehingga UU yang telah direvisi itu nantinya bisa bersinergi dengan seluruh kepentingan masyarakat Indonesia,” jelasnya.

Politisi Partai Demokrat itu kembali menegaskan, dengan dikeluarkannya Surpres oleh pemerintah terkait revisi UU Nomor 5 Tahun 1990, menandakan bahwa pemerintah sangat merespon dan mengantisipasi dari pembahasan UU tersebut. ■ dep/sf

Revisi UU Nomor 5 Tahun 1990 Tetap Dilanjutkan

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menyatakan bahwa usulan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem akan tetap dilanjutkan. Agus mengatakan, hal itu dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Presiden (Surpres) oleh pemerintah, dan DPR juga sudah menyiapkan draf undang-undangnya.

“ Kita semua akan fokus melanjutkan revisi UU Nomor 5 Tahun 1990, karena UU ini sangat berguna bagi kehidupan berbangsa dan

bernegara, terutama perlindungan terhadap sumber alam hayati,” ucap Agus usai menerima audiensi Kelompok Kerja (Pokja) Konservasi Sumber daya

Kita semua akan fokus melanjutkan revisi UU Nomor 5 Tahun 1990, karena UU ini sangat berguna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama perlindungan terhadap sumber alam hayati

Komisi III Soroti Peredaran Narkoba di Sumut

Sumatera Utara menjadi provinsi yang mendapat perhatian serius Komisi III DPR RI, karena merupakan daerah terbesar ke-2 dalam peredaran narkoba di Indonesia setelah Jakarta. Demikian dikatakan Anggota Komisi III DPR RI Muslim Ayub di sela-sela Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Sumut.



Foto: Guntur/jk

Anggota Komisi III DPR RI Muslim Ayub

Komisi III Pertanyakan Usulan Calon Hakim Agung



Anggota Komisi III DPR RI Adies Kadir

Foto: Doeh/zk

Komisi III DPR RI mempertanyakan integritas dan kapasitas para Calon Hakim Agung (CHA) yang diusulkan Komisi Yudisial (KY). Banyak calon hakim yang diusulkan KY ditolak Komisi III, atau setidaknya hanya satu atau dua calon hakim saja yang diterima. Sistem rekrutmen pun dipertanyakan.

Ini yang disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Adies Kadir saat mengikuti rapat konsultasi Komisi III dengan Mahkamah Agung (MA), dipimpin langsung Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir. Dan sebagai tuan rumah, MA pun langsung dipimpin Ketua MA Hatta Ali. Pertemuan yang berlangsung di Gedung MA, Jakarta, Selasa (17/4) itu, menyoal banyak masalah hukum hasil temuan Komisi III. Dan salah satu persoalan itu adalah sistem rekrutmen para calon

hakim agung.

“Tidak semua calon hakim agung yang diajukan KY memenuhi syarat dan profesional. Kadang jauh dari keinginan mewujudkan hakim agung yang profesional dan berintegritas. Terakhir, dari 4 calon hakim ad hoc industrial yang diusulkan KY, hanya dua yang diloloskan. Dan yang sangat mengherankan, KY mengatakan bahwa kesulitan itu ada di Komisi III,” ungkap politisi Partai Golkar ini.

Menurut Adies, problem rekrutmen

bermuara, di KY. Sepertinya banyak hakim profesional dan berintegritas justru tak diloloskan KY. Akhirnya, Komisi III hanya menerima calon hakim agung yang prestasi dan integritasnya jauh di bawah harapan. Para calon hakim agung yang pernah ditemui Komisi III, sambung Adies, justru menilai, tes di KY sangat membingungkan. Prestasi calon hakim agung juga tidak pernah dilihat KY.

“Kami mempertanyakan profesionalitas KY dalam memilih hakim-hakim agung. Kami minta MA merumuskan kembali dengan KY sistem yang tepat terkait rekrutmen hakim agung. Jangan sampai hakim agung yang bagus yang diusulkan MA tidak diloloskan oleh KY. Dan hakim-hakim agung yang diusulkan KY ke Komisi III kapasitasnya di bawah standar. Kami pernah tidak meloloskan semua calon yang diusulkan KY,” tegas Adies lagi.

Ditambahkannya, KY sudah diberikan anggaran besar yang salah satunya untuk rekrutmen para calon hakim agung. KY pun akan dimintai pertanggungjawabannya atas sistem rekrutmen hakim agung dengan alokasi anggaran yang besar. “Sistem rekrutmen dipertanyakan dengan biaya yang sangat besar. Tapi rekrutmennya begitu saja. Kami ingin meminta pertanggungjawaban KY, sebagaimana biaya yang sudah dikeluarkan, tapi calonnya ditolak oleh DPR,” tutupnya. ■mh/sf

Letaknya yang merupakan perbatasan antara Aceh dan Malaysia membuat perdagangan narkoba menjadi lebih mudah, serta sulit diidentifikasi oleh pihak Kepolisian, ditambah kurangnya dukungan personil dan anggaran,” ucap Ayub di Mapolda Sumut, Kamis (12/4).

Ayub juga mengingatkan agar negara tidak boleh kalah dalam mengatasi persoalan itu. “Masalah keterbatasan anggaran, fasilitas, dan bahkan personil bukan jadi halangan atau alasan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan perang dan pemberantasan terhadap para sindikat narkoba,” tandasnya.

Politisi Partai Amanat Nasional itu menyampaikan bahwa ada beberapa catatan tentang hukuman dakwaan narkoba yang kadang vonisnya terlalu ringan, karena klasifikasi pasal pemakai dan/atau pengedar narkoba tersebut,

seringkali melar karena oknum. “Saya memberikan apresiasi karena di wilayah Sumut hal ini sudah mulai diantisipasi,” imbuhnya.

Senada dengan Ayub, Wakil Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunker Mulfachri Harahap menyatakan bahwa seluruh catatan atau temuan dalam kunjungan kerja ini akan dibawa untuk ditindaklanjuti di Komisi III dan menjadi bahan evaluasi yang tidak terpisahkan.

“Kami akan konkret sampaikan kembali kepada badan-badan terkait seperti BNN, Polri, dan Kejaksaan untuk perbaikan,” tegas politisi Partai Amanat Nasional itu.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al-Habsyi mendorong pemerintah melalui BNN dan Polri supaya lebih serius lagi dan mempunyai satu sikap yang sama untuk bertindak lebih

keras dan tegas dalam menangani kasus peredaran narkoba.

“Karena situasi kita sudah genting terhadap perdagangan narkoba. Memang beberapa waktu terakhir terjadi penindakan yang cukup tegas dari aparat di Sumut terhadap para pengedar narkoba, dan kami mendukung kerja keras dan sikap tegas dari aparat ini,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Kunjungan kerja Komisi III ke Sumut ini adalah sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap pemberantasan narkoba, netralitas Polri dalam Pilkada serentak, dan pengawasan tenaga kerja asing yang berkaitan dengan bidang kerja Komisi III dalam persoalan hukum, HAM dan keamanan. ■gd/sf

Budi Daya Terumbu Karang Berpotensi Tingkatkan Devisa

Aktivitas perdagangan terumbu karang untuk kebutuhan akuarium hias, sebagian besar ada di Bali. Upaya pembudidayaan terumbu karang ternyata memiliki potensi pasar ekspor yang luar biasa. Apalagi, pasar Eropa menyerap hasil budi daya terumbu karang sangat besar.



Foto: Anief/jk

Anggota Komisi IV DPR RI Mahfuz Sidik

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menambahkan, dari data sekitar 50 asosiasi yang terhimpun di Bali, total nilai ekspor mencapai Rp200 miliar. Kendati ini masih skala kecil, tetapi menurutnya mempunyai prospek yang besar, dengan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Jika KLHK bisa memberikan prioritas lebih kepada usaha pembudidayaan terumbu karang dan bersinergi dengan pelestarian habitat terumbu karang, maka bukan saja bisa meningkatkan volume ekspor dan devisa negara, tapi juga kekhawatiran tentang rusak dan punahnya habitat terumbu karang bisa kita atasi,” optimisnya.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro menambahkan, masih tingginya permintaan koral alam dari negara luar diperlukan pengawasan yang baik untuk menghindari penyelundupan koral secara ilegal.

“Perkembangannya dengan pembinaan aturan yang dipermudah oleh pemerintah, maka masyarakat yang dulu tidak sampai 10 persen, sekarang sudah 50 persen lebih mengadakan penangkaran ataupun budi daya koral,” tandas politisi Partai Gerindra itu. ■ afr/sf

“Kalau ini bisa dikembangkan dan kemudian pemerintah mengambil kebijakan yang insentif, saya pikir ini peluang untuk peningkatan devisa. Karena pembudidayaan terumbu karang juga menjadi cara lain untuk pelestarian

habitat terumbu karang yang ada di Indonesia,” kata anggota Komisi IV DPR Mahfuz Sidik saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI meninjau budi daya terumbu karang dan ikan hias di PT. Dinar Darum Lestari, Bali, Sabtu (13/4).

Potensi Budi Daya Ikan dan Pengolahan Sumsel Besar

Anggota Komisi IV DPR RI Fauzih H. Amro menilai Provinsi Sumatra Selatan memiliki potensi besar untuk pengembangan budidaya ikan tawar dan pengolahannya. Menurutnya, hal ini jika dikembangkan dengan serius, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Palembang.

Hal ini mengemuka dalam Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI di Sentra Kuliner Ikan Area Monpera Palembang, Sumsel, Kamis (12/4), yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo.



Foto: Andri/jk

Tim Kunker Komisi IV DPR RI menyerahkan bantuan simbolis permodalan untuk nelayan di Sumsel

Komisi IV Soroti Program BPNT Sumut

Komisi IV DPR RI meminta instansi terkait untuk bersinergi menyelesaikan seluruh persoalan yang terjadi pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Medan, Sumatera Utara, agar tidak terulang lagi.

Hal tersebut mengemuka saat Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan (F-PKB) meninjau secara langsung pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Medan, Kamis (12/4).

Dalam kesempatan tersebut, warga yang juga merupakan KPM mengeluhkan kerap tidak adanya saldo pada kartu yang dimilikinya. Selain itu, para penyalur bantuan yang terdiri dari agen BRI-Link dan E-Warung kerap melakukan persaingan usaha yang cukup ketat dengan tidak hanya memberikan item bantuan yang diwajibkan oleh Pemerintah.

Sejauh ini, item yang diwajibkan oleh pemerintah untuk diberikan pada KPM hanya beras dan telur. Hal ini merupakan keinginan pemerintah untuk membantu pangan masyarakat yang bernutrisi. Namun kenyataan di lapangan,

Fauzih menilai, Sumsel kaya akan potensi perikanan air tawar dan hampir semua kulinernya menggunakan bahan baku ikan. Untuk itu, Komisi IV DPR RI mendorong untuk menggalakkan upaya konsumsi ikan kepada masyarakat. “Di Palembang, empek-empek yang sangat terkenal bahan baku utamanya dari ikan,” imbuh Fauzih.

Politisi F-Hanura ini pun mendukung rencana Balai Riset Perikanan dan Perairan Umum Palembang untuk mengembangkan budidaya ikan air tawar, karena dinilai sangat potensial. Selain itu, ikan mempunyai nilai ekonomis tinggi, sebab ikan paling digemari masyarakat.

“Kita akan mendukung produk-produk yang disukai masyarakat. Sehingga dengan adanya pembudidayaan, kita tidak tergantung dari hasil tangkap. Potensi budi daya bisa menghasilkan ikan berkali lipat, sedangkan dari tangkap tidak,” imbuh politisi dapil Sumsel itu.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Sumsel Nasrun Umar mengatakan,



Tim Kunker Komisi IV DPR RI meninjau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Medan

Foto: Nadya/zk

justru bantuan bisa berupa kebutuhan pokok lainnya seperti sabun, minyak goreng dan lainnya. Dan hal ini cukup membuat penyalur yang mengikuti aturan Pemerintah sepi dari para KPM.

Menanggapi hal tersebut, Daniel memastikan akan membawa seluruh masukan yang didapat untuk dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait. Ia memaklumi hal ini, karena program berjalan belum lama.

“Tetapi semua masalah ini harus segera selesai karena ini punya dampak.

salah satu sumber pertumbuhan ekonomi daerah Sumsel yang potensial adalah sektor kelautan dan perikanan air tawar, khususnya Perairan Umum Daratan (PUD).

Hal ini didasarkan pada potensi perikanan khususnya PUD Sumsel yang memiliki potensi sangat besar, yakni kurang lebih 2.505.000 ha dengan produksi sebesar 119.887,8 ton pada tahun 2016. Hal itu didukung dengan keanekaragaman hayati ikan yang cukup tinggi, lebih dari 233 jenis ikan serta wilayah Sumsel yang dilalui 9 sungai besar atau biasa disebut Sungai Batang Hari Sembilan.

“Semoga pertemuan dengan Komisi IV DPR RI ini memberikan manfaat bagi kita, khususnya pelaku UMKM Kelautan dan Perikanan, agar dapat memanfaatkan potensi perikanan di Sumsel,” harapnya.

Pada pertemuan tersebut, Komisi IV DPR RI juga menyalurkan bantuan kepada para nelayan, berupa bantuan kapal perikanan dan alat penangkap ikan, serta klaim asuransi nelayan dan bantuan permodalan nelayan. ■ man/sf

Artinya nanti yang dirugikan adalah pemerintah. Seharusnya pemerintah mendapat apresiasi dari masyarakat, malah sebaliknya masyarakat merasa dirugikan nanti,” kata politisi PKB itu.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo menilai perlunya solusi yang konkret untuk menyelesaikan seluruh persoalan pada program tersebut. Terlebih, menurut politisi PDI Perjuangan itu, program ini baru 1 tahun berjalan, tentu masih banyaknya *trial and error* di dalamnya. Meskipun secara keseluruhan programnya masih cukup bagus.

“Sesuai dengan yang kita harapkan tujuan Pemerintah dalam rangka untuk pemenuhan gizi dan pemenuhan nutrisi. Kita juga panggil beberapa dari yang berkepentingan seperti Kementerian Sosial dan Bank BRI sebagai salah satu bank penyedia kartu itu segera menyampaikan, untuk bisa segera mencari solusi yang terbaik. Dan mereka mengiyakan untuk mencari solusi yang terbaik. Tapi pada dasarnya beberapa kelemahan dan kendala masih dalam batasan koridor, dan bisa kita selesaikan, dalam hal ini dari sisi Pemerintah,” tuturnya.

Turut hadir dalam Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara ini, diantaranya Anggota Komisi IV DPR RI Effendy Sianipar (F-PDI Perjuangan), Salim Fakhry (F-PG), Oo Sutisna (F-Gerindra), Endro Hermono (F-Gerindra), Acep Adang Ruhiat (F-PKB), Hermanto (F-PKS) dan Sulaiman L. Hamzah (F-Nasdem). ■ ndy/sf

Perluasan Bandara Tjilik Riwut Butuh Dukungan Anggaran



Tim Kunker Komisi V DPR RI meninjau perluasan terminal penumpang Bandara Tjilik Riwut Palangkaraya, Kalteng



Foto: Oji/jk

Bangunan utama perluasan terminal penumpang Bandara Tjilik Riwut Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sudah selesai. Tinggal menyisakan pembangunan fasilitas penunjang, sehingga masih dibutuhkan dukungan anggaran dari APBN.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi V Sigit Sosiantomo saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka Peninjauan Infrastruktur dan Transportasi Ke Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (11/4).

“Secara keseluruhan proyek perluasan terminal penumpang Bandara Tjilik Riwut bangunan utamanya sudah selesai, tinggal penyelesaian akhir pada landscape, area parkir, akses ke terminal lama dan fasilitas Garbarata,” terang Sigit, usai melihat langsung kondisi fisik bangunan terminal baru Bandara Tjilik Riwut.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menilai, jika nantinya sudah dioperasikan, maka daya tampung terminal Bandara Tjilik Riwut bisa meningkat mencapai 1 juta penumpang per tahun. Hal tersebut bisa berdampak pada geliat kebangkitan ekonomi daerah.

“Ke depan, bandara ini juga potensial jika akan dinaikkan statusnya menjadi salah satu Embarkasi Calon Jemaah Haji di Kalimantan Tengah. Jika terwujud maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Tengah,” jelas Sigit menambahkan.

Terkait tambahan dukungan anggaran untuk *finishing*, Sigit menjelaskan bahwa tahun 2018 sudah dialokasikan sebesar Rp175 miliar untuk penyelesaian berbagai fasilitas penunjang Bandara Tjilik Riwut, yang pada rencana awalnya ditargetkan tahun 2018 bisa selesai.

Sementara permintaan tambahan anggaran sebesar Rp205 miliar dalam rencana kegiatan 2019 masih akan dibicarakan lebih lanjut, apakah masuk dalam APBN-Perubahan atau APBN 2019. Kebutuhan tersebut antara lain untuk pembangunan landasan pacu (runway) semula 2500 meter diperpanjang menjadi 3000 meter x 45 meter (9.843 ft x 148 ft).

Di sisi lain, Sigit juga mengingatkan Pemda agar dalam penyelesaian akhir nanti melibatkan kalangan arsitek lokal untuk desain interior dan fasilitas pendukung lainnya. Hal itu sesuai amanah UU Arsitek yang belum lama disahkan.

“Disayembarakan agar nanti desain interior bandara dan berbagai ornamen khas Kalteng itu terasa begitu penumpang mendarat di sini,” pesan Sigit.

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran saat pertemuan dengan Tim Kunker Komisi V DPR RI mengemukakan bahwa Bandara Tjilik Riwut merupakan Bandara terbesar di Kalimantan Tengah, dan ke depan diharapkan bisa menjadi Embarkasi Calon Jemaah Haji Kalimantan Tengah.

“Pembangunan terminal baru Bandara Tjilik Riwut dengan luas 15.553 meter persegi dua lantai dengan daya tampung penumpang lebih dari 1000 orang atau 1 juta penumpang per tahun,” paparnya.

Orang nomor satu di Kalteng inipun sangat berharap kedatangan Tim Komisi V DPR RI dapat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan transportasi melalui dukungan kebijakan anggaran di tingkat pusat.

“Kami di sini akan memaksimalkan PAD dan juga dana *corporate social responsibility* (CSR) dari perusahaan-perusahaan untuk ikut mewujudkan akses infrastruktur demi peningkatan ekonomi daerah,” pungkasnya. ■ oji/sf



Foto: Oj/ik

Tim Kunker Panja Freeport Komisi VII DPR meninjau kesiapan pembangunan smelter PT. AMNT di NTB

Komisi VII Apresiasi PT. AMNT Bangun Smelter

Komisi VII DPR RI mengapresiasi PT. AMMAN Mineral Nusa Tenggara (PT. AMNT) yang telah menyiapkan lahan seluas 100 hektar untuk pembangunan smelter. Bahkan, selain adanya kepastian lokasi dan pematangan lahan, *time schedule* juga sudah di atas target 10 persen.

Demikian diungkapkan Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Panja Freeport Komisi VIII meninjau kesiapan lokasi pembangunan smelter di PT. AMNT, Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selasa (17/4).

Politisi Partai Gerindra menjelaskan bahwa setelah peralihan kepemilikan dari perusahaan asing yaitu PT. Newmont Nusa Tenggara ke perusahaan nasional PT. AMNT, Komisi

VII ingin mengawal agar perusahaan tambang nasional ini melakukan semua kewajiban dan berjalan sesuai aturan perundangan.

“Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 mewajibkan perusahaan tambang membangun smelter paling lambat selama 5 tahun, sejak PP tersebut diterbitkan. Kami punya harapan besar pada PT. AMNT agar sukses membangun smelter yang ke depan bisa menjadi *role model* bagi perusahaan nasional dan BUMN,” terang

Gus Irawan.

Legislator dapil Sumatera Utara II ini juga menegaskan bahwa PT. AMNT sudah beralih dari rezim Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan tengah melakukan berbagai penyesuaian dengan peraturan tersebut. Menurutnya, langkah tersebut patut diapresiasi dan menjadi contoh bagi perusahaan tambang lainnya.

“Kita mendorong seluruh pemangku kepentingan terkait untuk memberi dukungan pembangunan smelter ini.

Kita mendorong seluruh pemangku kepentingan terkait untuk memberi dukungan pembangunan smelter ini. Apalagi ini akan bisa menjadi salah satu smelter terbesar di dunia dengan kapasitas produksi mencapai 2,6 juta ton per tahun

Apalagi ini akan bisa menjadi salah satu smelter terbesar di dunia dengan kapasitas produksi mencapai 2,6 juta ton per tahun,” harapnya.

Gus Irawan juga berharap, jika masa kontrak perusahaan tambang asing sudah habis, perusahaan nasional atau BUMN bisa mengambil alih dan mengelola berbagai kontrak karya yang masih dikuasai asing. Ini menjadi hal yang sangat penting supaya ada *role model* yang ia maksudkan.

Dalam kesempatan yang sama Presiden Direktur PT. AMNT Rahmat Makasau yang ikut serta mendampingi Tim Komisi VII menjelaskan bahwa sejak berganti kepemilikan dari perusahaan asing ke perusahaan nasional pada 2016 lalu, pembangunan smelter di Sumbawa Barat menjadi salah satu komitmen ke depan.

“Lahan sudah kami siapkan, bahkan AMDAL sudah selesai dalam tempo 4 bulan untuk proyek seluas 100 hektar bagi kami kemajuan yang sangat positif. Kami yakin target 2022 smelter akan beroperasi dan bisa tercapai atas kerja keras semua pihak,” terang Rahmat dalam sambutannya.

Dia juga berterima kasih atas dukungan semua pihak dalam masa transisi dari Newmont ke PT. AMNT bisa dilalui dengan baik, tak luput atas kerja sama semua pihak, manajemen, Pemda Sumbawa Barat, masyarakat juga Komisi VII yang setia mengawasi dari sisi pelaksanaan peraturan perundangan.

Kunker ini juga diikuti sejumlah Anggota Komisi VII di antaranya Eni Maulani Saragih, Nawafie Saleh, Ridwan Hisjam, Aryo P.S Djojohadikusumo, Ihwan Datu Adam, Andi Yuliani Paris, Peggi Patrisia Pattipi, Rofi Munawar, Muhammad Yudi Kotouky, Kurtubi, dan Tony Wardoyo. ■ oji/sf



Tim Kunker Komisi VIII DPR RI meninjau Kampung Siaga Bencana (KSB) di Sulawesi Selatan

Masyarakat KSB Panakukkang Tanggap Kondisi Darurat

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menilai masyarakat Kampung Siaga Bencana (KSB) Dusun Parangmalengu, Desa Panakukkang, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan tanggap terhadap kondisi darurat. Masyarakat KSB Panakukkang dalam keadaan darurat dinilai bisa menyelamatkan diri, tetangga, dan lingkungannya.

“Di Desa Panakukkang ada yang spesifik, ada semacam kearifan lokal bahwa kesiapsiagaan masyarakat itu bisa meminimalisir korban jiwa atau korban harta, benda, dan lain-lain,” jelasnya di sela-sela memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI meninjau KSB Desa Panakukkang, Palangga, Gowa, Sulawesi Selatan, Kamis (12/4).

Komisi VIII, kata politisi PKB ini, sudah empat kali melakukan kunjungan kerja ke KSB di Gowa ini terkait bencana. “Kami hadir di sini ingin mengevaluasi program pemerintah kira-kira keluhan masyarakat apa, dan bagaimana keluhan para Taruna Siaga Bencana (Tagana),” terang Marwan.

Menurutnya, letak geografis Indonesia memang rawan bencana. Bisa gempa, banjir, longsor dan lain-lain. Tidak sedikit dari bencana itu menelan korban, harta, maupun benda.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, kehadiran Komisi VIII di Panakukkang ini selain untuk melihat kesiapsiagaan masyarakatnya yang selalu menerima bencana banjir setiap tahun, juga untuk

menyalurkan bantuan dari Kementerian Sosial RI.

Bantuan terdiri dari bantuan logistik KSB senilai Rp42,9 juta. Kemudian bantuan logistik dari Dinas Sosial Kabupaten Gowa senilai Rp50,4 juta, bantuan pakaian PDH untuk Tagana di Universitas Islam Nasional dan penyerahan secara simbolis Truk Serbaguna dari Kemensos kepada Dinas Sosial Kabupaten Gowa.

Di akhir kunjungan tersebut Marwan yang didampingi Anggota Komisi VIII DPR RI Itet Tridjajati Sumarjianto (F-PDI Perjuangan), Budiman Sudjtmiko (F-PDI Perjuangan), Samsu Niang (F-PDI Perjuangan), Syofwatillah Mohzaib (F-PD), Lilis Santika (F-PKB), Ei Nurul Khotimah (F-PKS), dan Achmad Fauzan Harun (F-PPP) ini, menyaksikan simulasi penanganan banjir yang diperagakan warga Dusun Parangmalengu bersama Tagana.

Kunjungan Kerja Komisi VIII ini didampingi Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulsel Andi Ilham Ghazali dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa Syamsuddin. ■ sc/sf

Bantuan Bencana Harus Tepat Sasaran

Semua bentuk bantuan untuk para korban bencana alam harus tepat sasaran. Tentu dibutuhkan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah untuk menentukan prioritas bantuan. Anggaran yang dialokasikan begitu besar, harus sampai ke tangan para korban bencana.



Foto: Husen/jk

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI M. Iqbal Romzi memberikan sambutan di Kampung Siaga Bencana, Sumbar.

Ini yang diungkap Anggota Komisi VIII DPR RI M. Iqbal Romzi saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Bukittinggi, Sumatera Barat, Kamis

(12/4). Komisi VIII ingin melihat dari dekat program Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kelurahan Pulau Anak Air, Kota Bukittinggi. Lokasi ini termasuk yang rawan bencana, karena banyak

titik patahan yang sewaktu-waktu menimbulkan gempa dan tsunami.

“Anggaran Kementerian Sosial sebesar Rp40 triliun lebih sudah dialokasikan, yang salah satunya untuk bantuan sosial korban bencana alam. Sejauh ini belum ada sinergitas pusat dan daerah dalam menggalang bantuan,” ucap Iqbal saat memberi sambutan di hadapan para relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana) di Bukittinggi. Hadir dalam pertemuan itu Wakil Wali Kota Bukittinggi Irwandi.

KSB Parina yang ditinjau Komisi VIII ini, merupakan satu dari empat KSB yang ada di Bukittinggi. Wakil Wali Kota Bukittinggi Irwandi menjelaskan, kader Tagana yang siap menghadapi bencana juga terus dikembangkan hingga ke desa-desa. Kota Bukittinggi telah menerima alokasi anggaran untuk tanggap bencana sekitar Rp400 miliar.

Pada bagian lain, Irwandi mengeluhkan Dinas Sosial setempat yang belum memiliki kantor yang representatif. Untuk itu, pihaknya berharap agar Komisi VIII membantu Pemkot Bukittinggi merealisasikan kantor Dinas Sosial agar kinerja sosial dalam membantu masyarakat juga bisa optimal. Usai pertemuan, tim Komisi VIII ikut mencicipi makanan ringan hasil masakan para kader Tagana yang memasak di mobil dengan desain dapur darurat. ■ mh/sf

Fakultas Kedokteran Berperan Tingkatkan Ilmu Pengetahuan Kesehatan

Badan Legislasi DPR RI menekankan pentingnya peran Fakultas Kedokteran dalam meningkatkan ilmu pengetahuan kesehatan dan kedokteran. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Baleg Arif Wibowo saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Baleg ke Kota Malang, Jawa Timur, dalam rangka pemantauan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

“Undang-Undang ini menjawab dan memberikan solusi atas persoalan di masyarakat terkait praktik dan pendidikan kedokteran seperti, peran Fakultas Kedokteran dalam meningkatkan penguasaan pemanfaatan, penelitian, serta pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dan kedokteran gigi,” papar Arif di Kantor

Wali Kota Malang, Jawa Timur, Senin (16/4).

Arif menegaskan bahwa keberadaan UU Pendidikan Kedokteran merupakan salah satu UU yang penting dan strategis untuk melindungi masyarakat dengan pelayanan dokter yang berkualitas. Dia juga menyampaikan tentang peningkatan kualitas dan daya saing dokter dan dokter gigi Indonesia, dalam menghadapi

persaingan global dan beragamnya varian penyakit baru di tengah masyarakat.

Meskipun demikian, Baleg menyadari saat ini jumlah dokter dan dokter gigi masih minim, padahal kebutuhan akan keahlian ini penting di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan UU ini berusaha menjawab permasalahan tersebut. Karena UU Pendidikan Kedokteran mengamanatkan beberapa

Siti Masrifah Sidak RSUD Tangsel

Anggota Komisi IX DPR RI Siti Masrifah mengadakan inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tangerang Selatan, Banten, untuk menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai ketersediaan obat-obatan dari BPJS Kesehatan.

“ Saya mendengar dari konstituen saya mengenai ketersediaan obat-obatan di sini. Ada beberapa orang melapor bahwa mereka harus menebus beberapa obat di apotek luar karena kurangnya ketersediaan obat yang diresepkan oleh dokter di sini,” ujar Masrifah di RSUD Tangsel, Banten, Senin (16/4).

Mengenai masalah ketersediaan obat tersebut, politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu langsung menemui Direktur Utama RSUD Tangsel Suhara Manullang dan Seksi Pelayanan Medis RSUD Tangsel Taufik Dipa Sempana.

“Kita sudah tanyakan langsung kepada pihak RSUD, di sini memang ada kendala tersebut, namun jumlahnya sangat sedikit.



Foto: Kresno/jk

Anggota Komisi IX DPR RI Siti Masrifah sidak RSUD Tangerang Selatan, Banten

Karena mereka punya kebijakan, bilamana dana BPJS Kesehatan habis, mereka bisa menggunakan dana dari BLUD (Badan Layanan Umum Daerah),” ujar Masrifah.

Menanggapi hal itu, Seksi Pelayanan Medis RSUD Tangsel Taufik Dipa

Seksi Pelayanan Medis RSUD Tangsel Taufik Dipa Sempana memastikan tidak ada pasien BPJS Kesehatan yang membeli obat di luar RSUD Tangsel

Sempana memastikan tidak ada pasien BPJS Kesehatan yang membeli obat di luar RSUD Tangsel. Karena apabila RSUD Tangsel kehabisan stok obat, pihaknya akan langsung membeli obat dari apotek luar menggunakan BLUD, yang kemudian ditebus kembali ke pihak BPJS Kesehatan.

Dalam sidak tersebut, politisi dapil Banten III itu juga sempat menjenguk beberapa pasien yang dirawat di RSUD Tangsel, sekaligus menanyakan langsung tentang pelayanan dari pihak RSUD dan juga kendala-kendala yang dirasakan oleh para pasien, yang hasilnya ternyata positif memuaskan. ■ eno/sf



Foto: Eko/jk

Wakil Ketua Baleg DPR RI Arif Wibowo.

kebijakan dan peraturan pelaksanaan yang perlu dibuat oleh pemerintah, yakni sebanyak 19 peraturan pelaksana yang terdiri empat Peraturan Pemerintah (PP) dan 15 Peraturan Menteri (Permen).

Namun menurut Arif, hingga saat ini terkait peraturan pelaksana tersebut belum semuanya dilaksanakan. Bahkan terkait pelaksanaan peraturan seperti program pendidikan dokter layanan primer yang dinilai tumpang-tindih, telah menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat.

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga menjelaskan pada tahun ini pemerintah akan melaksanakan program Dokter Layanan Primer (DLP) yang di dalamnya menambah masa pendidikan dokter baru selama tiga tahun untuk melayani Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Alasan utamanya

Keberadaan UU Pendidikan Kedokteran merupakan salah satu UU yang penting dan strategis untuk melindungi masyarakat dengan pelayanan dokter yang berkualitas

karena pemerintah ingin memperkuat pelayanan primer dan upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat yang sekarang masih lemah.

“Maka secara khusus, kami juga ingin mencari masukan, data, dan fakta terkait program dokter layanan primer dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) ini,” ujar Arif. ■ eko/sf



Tim Kunker Komisi VIII DPR RI melakukan pertemuan dengan Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan

Foto: Eka/jk

Kasus Penipuan Umrah Akibat Lemahnya Regulasi

Anggota Komisi VIII DPR RI Bisri Romly mengatakan, kasus penipuan penyelenggaraan umrah umumnya terjadi karena lemahnya regulasi dan pengawasan dari para pemegang kebijakan, serta kurang maksimalnya penegakkan hukum. Ditambah lagi tingginya minat masyarakat terhadap umrah, dikarenakan lamanya waktu tunggu ibadah haji, membuat bisnis travel umrah berkembang di mana-mana.

“Bahkan tak jarang bisnis travel umrah diwarnai persaingan usaha yang tidak sehat. Perang harga yang tidak wajar banyak ditawarkan kepada calon jamaah. Janji-janji manis banyak yang berujung dirugikannya calon jamaah,” kata Bisri, saat mengikuti kunjungan kerja Panja Penyelenggaraan Umrah dan Haji Khusus Komisi VIII DPR RI ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (17/4). Kunker ini dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily.

Politisi PKB itu menambahkan, seminggu yang lalu, tepatnya pada tanggal 10 April 2018, kasus penipuan jamaah umrah kembali terjadi di Sulawesi Selatan. Kasusnya sudah ditangani Polda Sulawesi

Selatan. Yaitu penipuan terhadap jamaah umrah dengan kerugian senilai Rp100 miliar yang dilakukan biro perjalanan haji dan umrah PT Global Inspira Indonesia yang berkantor di Jalan Tupai, Makassar, Sulsel.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Choirul Muna meminta untuk dilakukan perbaikan secara menyeluruh mengenai kebijakan penyelenggaraan umrah dan haji khusus, agar kasus-kasus yang marak terjadi pada beberapa tahun terakhir tidak terulang terjadi di masa mendatang. “Jika tidak demikian, maka hal ini akan menimbulkan kecauan dan keresahan di masyarakat,” imbuh politisi Partai NasDem itu.

Dalam kesempatan yang sama, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulsel Abd. Wahid Thahir mengatakan bahwa semenjak

pemerintah memberlakukan secara total sistem kuota dalam penyelenggaraan ibadah haji, mengakibatkan waktu tunggu yang cukup lama bagi para umat Islam di Sulsel yang ingin menunaikan ibadah haji. Maka ibadah umrah menjadi pilihan bagi mereka yang menginginkan segera menuju Tanah Suci, dengan biaya perjalanan umrah di bawah biaya haji.

“Kasus-kasus penyelenggaraan umrah di Sulawesi Selatan seperti perusahaan travel umrah Abu Tours dikomandani oleh Hamzah Mamba yang berpusat di Makassar, Shafa Mulia Utama dimiliki oleh Lukman Jamaluddin, dan Global Tour yang dimiliki oleh Edwin Abdul Jabar, sudah diselidiki dan ditahan oleh Kepolisian Daerah Polda Sulsel, setelah banyaknya laporan jamaah,” kata Wahid.

Perlu diketahui bahwa jumlah jamaah umrah Indonesia adalah kedua terbesar di dunia setelah Pakistan. Pada tahun 2016 jamaah umrah Indonesia mencapai 649.000 orang dan tahun 2017 mencapai 875.958 orang dengan rata-rata keberangkatan sebanyak 81.000 jamaah umrah setiap bulannya. Jumlah ini diprediksi akan terus meningkat pada tahun 2018 dan tahun-tahun selanjutnya dikarenakan faktor lamanya waktu tunggu haji dan sejalan dan minat masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan yang terus meningkat. ■ hr/sf

Komisi XI Pilih Agus Joko Pramono Sebagai Anggota BPK



Anggota Komisi XI DPR Michael Jeno

Foto: Doehy/jk

Anggota Komisi XI DPR RI Michael Jeno menuturkan, pihaknya telah mendalami seluruh visi misi para calon serta program kerjanya. Ia pun berharap Anggota BPK terpilih mampu meningkatkan kualitas pemeriksaan keuangan negara untuk menghadirkan penyelenggaraan negara yang akuntabel.

“Komisi XI telah lakukan uji kelayakan

Voting Komisi XI DPR RI menghasilkan Agus Joko Pramono sebagai calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan perolehan suara terbanyak. Agus memperoleh 51 suara, mengungguli 17 calon lainnya. Hasil ini nantinya akan diserahkan kepada Pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti dalam keputusan ditingkat Paripurna.

dan kepatutan terhadap 18 calon Anggota BPK. Kita telah mendalami visi dan misi dan program kerja para kandidat anggota BPK, sama seperti biasa kita kembalikan pada tugas dan wewenang BPK sebagai auditor negara,” ungkap Jeno usai pengambilan keputusan hasil uji kepatutan dan kelayakan calon Anggota BPK di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, (18/4).

Politisi PDI Perjuangan ini menuturkan, Anggota BPK yang baru nanti harus mampu mendorong adanya pemeriksaan kinerja pemeriksa yang bisa diperiksa BPK sehingga bisa terjaga.

“BPK lakukan pemeriksaan keuangan, yang selalu jadi konsen kita. Pemeriksaan keuangan kita kadang dengan latar belakang auditor biasa dilakukan BPK. Jadi yang perlu didorong adalah pemeriksaan kinerja. Kebijakan pemerintah diperiksa

BPK. Sehingga bisa terjaga,” ungkap Jeno.

Jeno menambahkan BPK perlu melakukan pemeriksaan yang sifatnya pencegahan. Sehingga tidak selalu pemeriksaan yang bersifat *post-audit* (setelah kejadian). Ini perlu menjadi konsen agar BPK mampu bekerja sesuai dengan tuntutan untuk menjaga kredibilitas keuangan negara.

“Banyak audit yang dilakukan dengan cara *post-audit*. Kita dorong BPK lakukan pemeriksaan yang bersifat pencegahan dan pemeriksaan kinerja terhadap kebijakan pemerintah,” sambung Jeno.

Diketahui, dari 54 suara anggota Komisi XI terhadap 18 calon, Agus Joko Pramono memperoleh suara terbanyak dengan jumlah 51 suara, selanjutnya Muhammad Syarkawi Rauf sebanyak 2 suara dan Ilham sebanyak 1 suara. ■ hs/sf

Pariwisata Indonesia Terkendala Minimnya SDM

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra mengatakan, salah satu masalah dalam pengembangan pariwisata di Indonesia adalah kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum mendukung tumbuh kembangnya industri wisata di Tanah Air. Dengan target kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) mencapai 20 juta kunjungan pada tahun 2019, SDM menjadi hal yang harus dipersiapkan.

“Selain masalah infrastruktur dan promosi, SDM wisata masih menjadi kendala dalam pengembangan dunia pariwisata kita. Permasalahan SDM harus kita urai dari hulunya, yaitu dengan jalan menggandeng pihak perguruan tinggi, agar memberi dukungan pada pengembangan SDM pariwisata,” kata Sutan dalam rilis yang diterima Parlemen, Kamis (19/4).

Menurut Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR ini, salah satu dukungan ataupun sinergitas yang diharapkan

dengan perguruan tinggi adalah pembuatan kurikulum pendidikan yang mendukung pengembangan SDM pariwisata.

“Terus terang kita mengharapkan dunia kampus bisa menjawab masalah SDM ini dengan kurikulum pendidikan, atau bahkan membuat program studi yang bisa linear dengan kebutuhan pariwisata,” harap Sutan.

Karena ke depan dalam era perdagangan bebas nanti, lanjut politisi dapil Jambi itu, SDM wisata harus memiliki kriteria profesional dan tersertifikasi oleh



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra

Foto: Azka/jk

lembaga profesional termasuk institusi pendidikan.

“Sehingga dalam usaha menyamakan persepsi tentang peran dunia pendidikan bagi pengembangan pariwisata, juga perlu adanya program pelatihan SDM pariwisata ke kampus-kampus. Harapannya bisa disinergikan dengan kurikulum kampus,” harap Sutan. ■ sf

Komisi II Dorong Pemerintah Selesaikan Persoalan Perangkat Desa

Komisi II DPR RI mendorong pemerintah segera memutuskan peningkatan honorarium Perangkat Desa yang ada di seluruh Indonesia. Seperti diketahui tuntutan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) adalah menagih janji Presiden Joko Widodo sewaktu berkampanye beberapa tahun yang lalu, yang akan mengangkat status para Perangkat Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).



Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo

honorarium para Perangkat Desa akan disetarakan dengan ASN golongan IIA.

“Aparatur pemerintah desa ini merupakan garda terdepan. Apalagi saat ini menjelang Pemilu, kalau mereka tidak mendapatkan perhatian dan tidak segera diselesaikan persoalannya, dikhawatirkan terjadi boikot tidak mau melaksanakan tugas-tugas kewenangannya yang terkait dengan masalah persiapan Pemilu, maka akan berbahaya sekali.

Oleh karenanya, kami menekankan agar tuntutan mereka dapat segera dipenuhi,” tegas Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum dengan PPDI di Gedung

Para Perangkat Desa perlu mendapatkan perhatian di bidang kesejahteraan, dan itu sudah menjadi kesepakatan pada rapat sebelumnya

DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/4).

Firman menyatakan, para Perangkat Desa perlu mendapatkan perhatian di bidang kesejahteraan, dan itu sudah menjadi kesepakatan pada rapat sebelumnya yang dilaksanakan pada Januari 2018. “Tetapi sampai hari ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah. Oleh sebab itu, pada pertemuan kali ini ditegaskan kembali mengenai tuntutan itu. Ini harus segera diselesaikan, karena ini adalah persoalan serius,” tandasnya.

Alasan pemerintah belum dapat memenuhi tuntutan tersebut karena masalah klasik, yakni masalah keuangan, lanjutnya. “Kalau untuk kenaikan gaji pegawai Pajak, pegawai Bea Cukai, BUMN Perbankan, BI, dan lain sebagainya kenapa uangnya selalu siap. Tetapi kalau untuk urusan orang kecil selalu saja mengatakan tidak ada uang,” tukas Firman.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, perlakuan seperti itu tidak hanya dilakukan kepada PPDI, tetapi juga pada nasib tenaga honorer yang sampai sekarang nyaris tidak terselesaikan. ■ dep/sf

Namun, karena secara aturan perundang-undangan yang ada saat ini hal tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka akhirnya disepakati

Kapasitas Peneliti DPR Harus Ditingkatkan

Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk menyerukan kepada para peneliti yang ada di DPR RI untuk senantiasa mengembangkan kapasitas pengetahuannya, dengan mengikuti beberapa seminar-seminar yang kerap diadakan oleh Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Hal itu ia ungkapkan saat membuka Seminar Nasional dan Pelantikan Pengurus Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo) Cabang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, dengan tema; ‘Peran Peneliti dalam

Peningkatan Kualitas Kinerja Parlemen,’ di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/4).

“Kapasitas pengetahuannya sudah terus kita kembangkan dan terus dilakukan lewat seminar ini. Seminar itu salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas dari setiap peneliti kita. Ya



Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk.

Komisi VIII Minta Kemenag Terbitkan Izin Embarkasi Haji Riau

Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama (Kemenag) RI agar secepatnya menerbitkan izin Embarkasi Haji Antara di Provinsi Riau. Apalagi, jumlah jamaah haji maupun umrah di Riau sangat besar, sehingga diharapkan mendapat prioritas dan perhatian dari pemerintah.



Foto: Iwan/jk

Tim Komisi VIII DPR RI didampingi Kakanwil Kemenag Provinsi Riau meninjau Embarkasi Haji Antara, Pekanbaru

“Komisi VIII sangat paham dan mengerti dengan apa yang diinginkan masyarakat Riau. Betapa pentingnya Embarkasi Haji Antara ini supaya segera mendapatkan

izin dari Kemenag,” ujar Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI Deding Ishak usai meninjau lokasi Embarkasi Haji Antara, di Pekanbaru, Riau, Rabu (18/4).

Tim Kunker Komisi VIII DPR RI menyempatkan berkeliling melihat kondisi gedung, mulai dari asrama haji, masjid dan aula kedatangan dan keberangkatan sebagai syarat sebagai embarkasi haji. Dari hasil yang dilihat, Deding semakin optimis Embarkasi Haji Antara Riau segera terwujud tahun ini.

“Kalau sudah seperti ini, tidak membutuhkan waktu lama embarkasi haji Antara Riau segera terwujud. Asrama haji kan sudah ada walaupun ini sementara, dan aula kedatangan dan ruang makan jamaah haji sedang *finising*-nya, karena fisiknya sudah,” kata Deding.

Politisi Partai Golkar ini berharap Kemenag dapat merespon cepat keinginan Pemprov Riau yang tengah memperjuangkan harapan masyarakatnya tersebut. Terlebih lagi, lanjutnya, jumlah jamaah haji dan umrah yang berasal dari Riau ini sangat banyak sekali. Deding berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama, Kemenag bisa menerbitkan izin Embarkasi Haji Antara Riau.

“Mohon diberi perhatian khususlah, karena ini kepentingan umat. Riau ini adalah lambang Melayu yang identik dengan Islam, yang masyarakatnya taat menjalankan ibadah haji dan umrah,” tegas Deding.

Sementara ditempat yang sama, perwakilan Pemprov Riau yang diwakili oleh Asisten I Gubernur Riau Ahmad Syahrofie mengatakan persiapan Embarkasi Haji Antara secara teknis sudah memenuhi syarat. Pihaknya berharap Komisi VIII DPR RI dapat mendorong Menteri Agama dapat memberikan izin Embarkasi Antara di tahun 2018 ini. ■ iw/sf

memang sebagai sebuah introspeksi para peneliti itu harus berani bicara, jadi jangan sampai kita ini hanya di atas kertas *melulu*,” ungkap Johnson.

Dalam kesempatan tersebut, Johnson juga mengungkapkan pendapatnya soal keberadaan dari para peneliti tersebut. Menurutnya, para peneliti DPR RI kerap tidak memiliki keberanian untuk menjelaskan atau berbicara soal lembaganya sendiri disaat lembaganya tengah dilanda kritikan atau lain sebagainya.

“Kita yang punya pengalaman pengetahuan tentang ke-DPR-an, tapi kok menurut saya sampai sekarang ini banyak para peneliti kita sepertinya kurang keberanian, atau alasan lainnya. Tetapi yang jelas, faktanya bahwa yang bicara tentang ke-DPR-an itu lebih

banyak dari luar,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Indra Pahlevi menjelaskan, keberadaan Pusat Penelitian itu sendiri baru masuk secara struktur pada tahun 2015 lalu. Dimana Pusat Penelitian BK DPR RI pun menyadari tantangan yang dihadapi adalah agar tetap bisa memberikan *support* kepada Anggota DPR RI secara lebih optimal.

“Kita tahu di beberapa parlemen lain, misalnya di Amerika Serikat ada *Congressener Reset Services*, di Australia ada *Library Of Australian Parliament* yang di dalamnya ada para peneliti. Mereka memberikan *support* yang penuh kepada Anggota Parlemennya. Di sini kita sebetulnya sudah memberikan

dukungan, tetapi bagaimana kita meningkatkan agar supaya keberadaannya jauh lebih bermanfaat dan berguna untuk para Anggota Parlemen itu sendiri,” ucapnya.

Terkait jumlah peneliti Setjen dan BK DPR RI yang masih dikategorikan minim, Indra berharap segera ada penambahan peneliti dan juga penunjang bagi kinerja peneliti terkait.

“Harapan kami, selain penambahan peneliti yang lebih banyak tentu juga fasilitas-fasilitas. Dari fasilitas itu tidak hanya materi, tapi fasilitas pendidikan dan ruangan yang memadai juga dan tentu akses-akses untuk bisa memberikan kontribusi kepada Anggota DPR itu juga lebih terbuka lebar,” harapnya.

■ ndy/sf

Keterlibatan Anak pada Kontestasi Politik Harus Diawasi

Persoalan keterlibatan anak dalam kontestasi politik masih sangat jarang disuarakan. Hal ini belum menjadi isu yang massal dan perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Hal ini penting karena anak adalah masa depan bagi semua orang. Apabila salah dalam mengarahkannya sejak kecil, maka masa depannya akan salah arah juga.

Demikian dikatakan Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali dalam acara diskusi Forum Legislasi yang membahas tentang 'Peraturan KPU Soal Larangan Pelibatan Penyalahgunaan Anak-anak Saat Kampanye' di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/4).

"Pada saat debat-debat Pilkada, isu tema tentang anak harus menjadi perdebatan. Sehingga sejak awal, dalam benak seorang Calon Kandidat sudah terekam bahwa ia harus memiliki konsep perhatian terhadap anak-anak," ujar Zainudin.

Menurutnya, Komisi II DPR RI akan mendorong hal teknis dan praktis seperti itu, dan penyelenggara pun pasti tidak akan merasa keberatan. "Komisi II DPR akan terus mendukung perlindungan terhadap anak. Semua fasilitas yang menunjang terhadap perlindungan anak harus kita siapkan, dan kekurangan aturannya akan kita sempurnakan," ujarnya.

DPR sebagai pembuat Undang-Undang akan terbuka dalam menerima masukan-masukan itu, sambung politisi Partai Golkar itu. "Komisi II saat ini sedang membahas tentang PKPU khusus untuk Pemilu, sebagai turunan dari UU Nomor 7 Tahun 2017. Belum terlambat bagi KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) untuk mendorong isu ini menjadi bagian dari atensi kita," tegas Zainudin.

Ia juga merasa prihatin melihat eksploitasi anak yang terjadi pada saat kampanye atau disaat-saat lain, tetapi masih menjadi bagian dari kontestasi. Zainudin mengatakan, pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) paling hanya bisa mengingatkan karena tidak ada sanksi tegas. Apalagi kalau muncul alasan klasik, yaitu para orang tua tidak bisa meninggalkan anaknya sendirian di rumah, saat mereka mengikuti kampanye.

"Alasan klasik itulah yang menjadi pembenar para orang tua membawa

anak ke lokasi kampanye. Kita berharap kepada para penyelenggara pemilu agar mempunyai perhatian terhadap isu ini. Oleh karenanya, saya mengusulkan agar di dalam setiap penyelenggaraan kampanye, ada tempat untuk menitipkan anak. Dan panitia penyelenggara kampanye bertanggungjawab atas hal tersebut," tandasnya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mempertanyakan, apakah memperkenalkan anak pada isu demokrasi dan politik hanya melalui kampanye. Titi berpandangan, berkaitan dengan keterlibatan anak di dalam Pemilu akan lebih cenderung pada unsur eksploitasi.

"Ada kecenderungan dari kontestan Pemilu kita yang lebih mengedepankan metode kampanye unjuk massa. Ketika

metode unjuk massa itu digunakan maka untuk membangun psikologis pemilih terkait dengan kebesaran massa sebuah partai dalam Pemilu, maka hal-hal yang tidak relevan kemudian digunakan, termasuk salah satunya adalah kehadiran anak di arena kampanye," kata Titi.

Titi menyatakan, Undang-Undang yang dibuat oleh Komisi II DPR RI sebenarnya sudah memberi payung hukum agar anak tidak diikutsertakan pada ranah eksploitasi politik. "Di dalam peraturan perundang-undangannya dikatakan bahwa Pelaksana dan atau Tim Kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan antara lain Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih," ungkapnya.

Senada dengan Titi, Komisioner KPAI Jasra Putra mengatakan bahwa isu pengikutsertaan anak dalam Pemilu jangan menjadi isu pinggiran. "KPAI sebagai pemegang mandat dalam hal perlindungan anak menyatakan bahwa anak memiliki hak untuk dilindungi dari penyalahgunaan politik. Regulasi yang tersedia untuk perlindungan anak dalam konteks pelibatan penyalahgunaan anak dalam politik sat ini masih abu-abu," tukasnya. ■ dep/sf



Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali

Foto: Rumi/jk



Ketua DPR Bambang Soesatyo menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama dan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/kota di Pancoran, Jakarta, Rabu (18/4). FOTO: JAKA/JK



Suasana uji kepatutan dan kelayakan Komisi XI DPR saat memilih calon Anggota BPK melalui voting di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Rabu (18/4). FOTO: DOEH/JK



Rapat Konsultasi Komisi III DPR dengan Mahkamah Agung dipimpin Ketua Kahar Muzakir di Gedung MA, Jakarta, Selasa (17/4). FOTO: DOEH/JK



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

mau motor? ala Dilan?

IKUTI LOMBA KRITIK TERBAIK DPR



KIRIM MEME & ESSAY
MEME (gambar, karikatur, video)
ESSAY maksimal 500 kata

MASA PENGIRIMAN KARYA: 19 APRIL - 15 AGUSTUS 2018
PENGUMUMAN 29 AGUSTUS 2018

PEMENANG UTAMA: MoToR ala Dilan
Juara I Rp 10 juta, Juara II, Rp 7 juta, Juara III Rp 5 juta

SAAT PENGUMUMAN
DILANGSUNGKAN
LOMBA
STAND UP COMEDY

KIRIM KE:



lombakritikterbaikDPR@gmail.com



lombakritikterbaikDPR@yahoo.com



[@LombaKritikTerbaikDPR](https://www.instagram.com/LombaKritikTerbaikDPR)



[@LombaKritikDPR](https://twitter.com/LombaKritikDPR)



[@lombakritikterbaikDPR](https://www.facebook.com/lombakritikterbaikDPR)